KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA BARAT: DANA PERIMBANGAN, PENGELUARAN PENDIDIKAN, DAN PENGELUARAN KESEHATAN

Skripsi Oleh:

Fictor Amnan

01021981621270

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

TAHUN 2021

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA BARAT : DANA PERIMBANGAN, PENGELUARAN PENDIDIKAN , DAN PENGELUARAN KESEHATAN

Disusun oleh:

Nama	: Fictor Amnan
NIM	: 01021981621270
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian	: Ekonomi Regional

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN	DOSEN PEMBIMBING
Tanggal : 13 November 2020	Ketua : Dr. Azwardi, M. Si NIP 196805181993031003
Tanggal : 24 September 2020	Anggota : Dr. Anna Yulianita, S.E,M.Si NIP 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

KESEJAHTERAAN ASYARAKAT PAPUA BARAT : DANA PERIMBANGAN, PENGELUARAN PENDIDIKAN , DAN PENGELUARAN KESEHATAN

Disusun oleh:

Nama	: Fictor Amnan
NIM	: 01021981621270
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi	: Ekonomi Regional

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Februari 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 19 Febrari 2021

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Dr. Azwardi, M.Si	Dr. Anna Yulianita,S.E.,M.Si	Dr.Sukanto, S.E, M.Si
NIP.196805181993031003	NIP.197007162008012015	NIP.197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E, M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 30-7-2021
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fictor Amnan

NIM : 01021981621270

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian / Konsentrasi : Ekonomi Regional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat: Dana Perimbangan, Pengeluaran Pendidikan, dan Pengeluaran Kesehatan".

Pembimbing:

Ketua : Dr. Azwardi, M.Si

Anggota : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 19 Februari 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 02 Juli 2021
Pembuat pernyataan,

Fictor Amnan
NIM. 0102198162

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan judul : Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat: Dana Perimbangan, Pengeluaran Pendidikan, dan Pengeluaran Kesehatan Terhadap IPM. Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga,motivasi, semangat dan waktu yang tidak terukur dalam menyusun skripsi ini. Keluh kesah, rasa lelah, kertakutan dan kekhawatiran menghadapi hal-hal yang belum penah dilewati membat penulis belajar mengenai arti dari perjangan dan penulis yakin setiap usaha yang dilakukan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan tapi kareana ada dorongan dari hati yang paling dalam pasti tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Ada, S.E,. M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E. M. Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Azwardi, M.Si dan Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E,. M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsin ini serta Bapak Dr. Sukanto, S.E,. M. Si selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf FE Unsri yang telah memberikan ilmu serta membantu saya sewaktu masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak Civitas Akademik Universitas Sriwijaya yang telah berkonribusi dalam membantu segala keperluan akademik saya.
7. Teristimewa kepada kedua oranng tua penulis, segenap keluarga, serta segenap keluarga besar KOMPAS Palembang, KOMPAS-Sesumatera, PDO NK, PMK, TRUTS, dan GMKI yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Sahabatku Eirene, Rosni, Nova, Gres, Sartika, Etus, Niko yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Alex, Yogi, Hasbi, Andreas, Dimas, Seveni, Habibi serta seluruh temanteman seperjuangan Ekonomi Pembanganunan 2016 dan juga temanteman seperjuangan KOMPAS 2016 yang telah menemani melalui indahnya masa perkuliahan dan tiada lelahnya ingat meningatkan kuat mengatkan dalam kesabaran.

10. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

Indralaya, 8 Mei 2021

Penulis,

Fictor Amnan

NIM. 01021981621270

Absrak

Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat : Dana Perimbangan, Pengeluaran Pendidikan dan Pengelaran Kesehatan

Oleh:

Fictor Amnan; Azwardi; Anna Yulianita

Penelitian ini berjuan untuk mengetahui seberapa besar dana perimbangan, pengeluaran pendidikan, dan pengeluran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi papua barat. Teknik analisis yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan metode time series dan cross secsian. Hasil analisis menunjukan bahwa dana perimbangan dan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi papua barat, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap indek pembangunan manusia (IPM) di provinsi papua barat.

Kata kunci : Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Ketua

Dr. Azwardi, M.Si
NIP: 196805181993031003

Anggota

Dr. Anna Yulianita, S.E, M.Si
NIP: 197007162008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonoi Pembangunan

Dr. Muklis, S.E,M.Si
NIP: 197304062010121001

Abstract

Welfare Of The People Of West Papua: Balance Fund, Education Expenditure and Health Expenditure

By:

Fictor Amnan Azwardi; Anna Yulianita

This study aims to find out how much the balance fund, education expenditure, and health expenditure is on the human development index (HDI) in the province of West Papua. The analysis technique used is panel data using time series and cross sectional methods. The results of the analysis show that the balance funds and education expenditure have a positive effect on the human development index (HDI) in the province of West Papua, while health expenditure has a negative effect on the human development index (HDI) in the province of West Papua.

Key words: Community Welfare, Human Development Index, Expenditure

Chairman

Dr. Azwardi, M.Si
NIP: 196805181993031003

Member

Dr. Anna Yulianita, SE, M.Si
NIP: 197007162008012015

Knowing,

Head of the Department of Economic Development

Dr. Mukhlis, SE, M.Si
NIP: 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	: Fictor Amnan
	NIM	: 01021981621270
	Tempat, Tanggal Lahit	: Nekori, 10 Maret 1997
	Alamat	: Jln. Angkasa Mulyono
	Nomor Handphone	: 085244026730
AGAMA	: Kristen Protestan	
JENIS KELAMIN	: Laki-laki	
STATUS	: Belum Menikah	
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia	
TINGGI	: 165 cm	
BERAT BADAN	: 54 kg	
KEGEMARAN	: Sepak Bola	
EMAIL	fictoramnan@gmail.com	
PENDIDIKAN		
2003 – 2009	SD YPK Anjai	
2009 – 2012	SMP Negeri 15 Manokwari	
2012 – 2015	SMA Negeri 1 Manokwari	
2016 – 2021	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
Absrak ..... **viii**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan 12
1.4 Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
2.1 Landasan Teori 15
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 15
2.1.2 Teori Ekonomi Kesejahteraan 17
2.1.3 Batas Kemungkinan Utilitas 17
2.1.4 Batas Kemungkinan Utilitas Utama 18
2.1.5 Kesejahteraan Sosial 18
2.1.6 Kesejahteraan Sosial Maksimum 18
2.2 Teori Pengeluaran Pendidikan 18
2.3 Teori Kesehatan 27
2.4 Teori Transfer 33
2.6 Kerangka Pemikiran 38
2.7 Hipotesis 40
BAB III METODE PENELITIAN **41**
3.1 Metode Penelitian 41
3.1.1 Jenis Data Penelitian 41

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel 41
3.2.1 Variabel Penelitian 41
3.3 Defini Operasional Variabel 42
3.4 Metode Analisis Yang Digunakan 42
3.5 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 45
3.5 Uji Statistik 48
3.5.1 Koefisien Determinansi ($R2$) 48
3.5.2 Uji Kelayakan Model 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Barat 50
4.1.1 Keadan Geografis 50
4.1.2 Perkembangan Kesejahteraan di Papua Barat 52
4.1.3 Perkembangan Ekonomi di Papua Barat 53
4.1.4 Perkembangan Keuangan Pemerintah Pusat di Papua Barat 55
4.1.5 Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2019 56
4.1.6 Perkembangan Pengeluaran Pendidikan 57
4.1.7 Perkembangan Kesehatan di Provinsi Papua Barat 59
4.1.8 Pendapatan Perkapita 61
4.1.9 Perkembangan DBH Migas 62
4.2. Hasil Penelitian 63
4.2.1. Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Common Effect Model 64
4.2.2. Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Fixed Effect Model 65
4.2.3. Hasil Perbandingan Antara Regresi Dengan Menggunakan Metode Common Effect dan Random Effect Model 66
4.3. Pemilihan Model Yang Digunakan 67
4.3.1. Uji Chow 67
4.3.2. Uji Langrange Multiplier 67
4.4. Pembahasan 69
4.4.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Kesehatan Dan Penerimaan DBH Terhadap IPM 69
4.4.2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Terhadap IPM 71
4.4.3 Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM 71

BAB V KESIMPULAN 73
5.1 Kesimpulan 73
5.2 Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN……...77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah Papua, yang oleh penyanyi Edo Kondologit dijuluki " surga kecil yang jatuh ke bumi", menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Harusnya, dengan kekayaan yang melimpah itu, Papua tidak pernah beresentuhan dengan kemiskinan. Tetapi kenyataanya berkisah lain. Dua Provinsi di tanah Papua, Papua Barat dan Papua, selalu salip menyalip sebagai Provinsi termiskin di Indonesia. Seperti tahun 2018 lalu, Papua Barat menempati rangking dua, sedangkan Papua rangking satu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kualitas pembangunan manusia, di Papua. Sepanjang tahun 2010-2017, Papua menjadi Provinsi penyandang IPM terendah se-Indonesia. Sejak Tahun 2017, skor untuk Provinsi Papua Barat di angka 62,99 sedangkan untuk Provinsi Papua skornya di angka 59,09.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka yang dibutuhkan adalah pembangunan. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses buat melakukan perubahan pada indikator sosial dan ekonomi, ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan berkesinanbungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009). Salah satu tolak ukukur keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian suatu wilayah yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar Negara, baik maju maupun

berkembang banyak yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator untuk menilai kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan manusia menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah proses perluasan piliah bagi penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumberdaya yang dapat memenuhi standar hdup yang layak. Demikian pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan produksi komoditas serta akumulasi modal. (Ginting, 2008).

Menurut Lanjow, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa identik pembangunan manusia di Indonesia adalah pengurangan kemiskinan. Akan lebih berarti kalau investasi di bidang pendidikan dan kesehatan bagi orang-orang yang mampu, karena asset mereka adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang murah akan sangat membantu meningkatkan produktifitas, pada giliranya menambah pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SDM belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi daerah secara umum menjadi Indikator keberhasilan pembangunan di daerah secara umum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang terus meningkat. Peningkatan ini diharapkan bisa dapat memberikan trickle-down effect. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi sudah sewajarnya menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat

nasional maupun daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga dikatakan berhasil apabila pendapatan perkapita penduduknya semakin meningkat. Modal dan tenaga kerja merupakan dua faktor produksi utama yang terdapat di dalam model pertumbuhan solow. Dalam yang di ungkapkan Artinya kewenangan daerah dalam menggali sumber keuangan yang ada di daerah dengan mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dengan demikian ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat arus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan.dengan adanya suatu pembangunan daerah, maka akan adanya pembangunan ekonomi .Selain itu, pembangunan manusia tentu harus menjadi prioritas. Hal ini menunjukan bahwa daerah belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu pengeluaran pemerintah untuk investasi merupakan bagian yang penting dalam pertumbuhan ekonomi baik dan benar. Tujuan pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga semakin besar pengeluaran investasi daerah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Manfaat dari IPM adalah membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antardaerah (Mudrajad, 2006). Pentingnya pembangunan manusia dalam suatu daerah karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat digunakan

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun atau memajukan daerahnya. Jadi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam memajukan daerah. Pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat

perlu mendapat perhatian khusus sebab masih rendahnya capaian nilai IPM, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau masalah kemiskinan. Rendahnya nilai IPM yang disebabkan oleh masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati pendidikan, kesehatan serta standar hidup yang kurang layak. Untuk meningkatkan kualitas nilai IPM maka dimulai dari perbaikan dan perhatian pada masalah pendidikan dan kesehatan (sumberdaya manusia), serta diikuti dengan sektor–sektor lain. Sumber daya Manusia perlu perhatian khusus karena merupakan modal bagi suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Dengan demikian pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin besar dan bisa meningkatkan IPM di suatu daerah. Sama halnya dengan PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan ke daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah tersebut untuk membelanjakan asset sehingga meningkatkan nilai Indeks Pembangunan (IPM) di Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.1

Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat Per-Fungsi Tahun 2018-2019

NO.	NAMA DAERAH	EKONOMI	KESEHATAN	PENDIDIKAN
1	Prov. Papua Barat	196,110,820,858	105,575,917,334	48,375,167,652
2	Kab. FakFak	116,874,684,467	116,165,095,217	183,543,527,712
3	Kab. Manokwari	83,451,762,542	112,898,593,658	225,225,771,200
4	Kab. Sorong	88,880,316,541	140,288,752,196	221,488,100,236
5	Kota Sorong	38,846,638,018	118,121,248,336	225,425,940,999
6	Kab. Raja Ampat	44,141,772,704	35,136,225,099	20,494,667,269
7	Kb. Sorong Selatan	123,594,679,825	125,429,717,830	146,675,407,178
8	Kab. T. Bintuni	287,509,493,059	166,079,635,829	220,708,663,293
9	Kab. T. Wondama	31,375,736,355	21,444,144,629	10,289,813,663
10	Kab. Kaiman	4,493,042,834	5,506,025,710	10,720,576,611
12	Kab. Maybrat	11,522,045,871	8,823,283,077	13,179,073,813

12	Kab. Tambrauw	112,042,088,447	59,922,452,904	72,527,934,217
13	Kab. Manokwari Selatan	45,673,505,058	36,149,389,116	44,415,746,915

Sumber: "DJPK/ Kementerian Keuangan RI."

Berdasarkan tabel 1.1 data Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat per-fungsi tahun 2016. Untuk pengeluaran masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda nilai belanja APBD per-fungsinya. Pengeluaran paling besar untuk fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan itu berada di Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai 287,509,493,059 jutaan rupiah untuk fungsi ekonomi, sedangkan untuk fungsi kesehatan itu sebesar 166,079,635,829 jutaan rupiah, dan pengeluaran paling rendah atau paling sedikit untuk fungsi ekonomi berada di Kabupaten Kaiman dengan nilai 4,493,042,834 jutaan rupiah. Fungsi pendidikan pengeluaran paling banyak di Kota Sorong dengan nilai sebesar 225,425,940,999. Pengeluaran paling rendah untuk 3 (tiga) funfsi tersebut berada di Kabupaten Kaimana. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Tingkat kesehatan masyarakat Papua Barat belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, dan lain-lain. Masalah kesehatan lain di Papua Barat adalah terjangkit penyakit malaria. Ibu hamil dan balita menjadi berisiko mengalami anemia dan kekurangan gizi apabila terkena penyakit malaria. Masih tingginya kematian akibat malaria di Papua Barat

karena masyarakat menganggap penyakit ini merupakan penyakit endemik yang pasti diderita oleh masyarakat di Pulau Papua.

Tabel 1. 2

Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Tahun 2014-2018

PROVINSI/NASIONAL	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	68,81	69,45	70,00	70,71	71,19
Sumatera Utara	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18
Sumatera Barat	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73
Riau	70,33	70,84	71,2	71,79	72,44
Jambi	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65
Sumatera Selatan	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39
Bengkulu	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64
Lampung	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02
K. Bangka Belitung	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67
K. Riau	73,4	73,75	73,99	74,45	74,84
DKI Jakarta	78,39	78,99	79,06	80,06	80,47
Jawa Barat	68,08	69,5	70,05	70,65	71,3
Jawa Tengah	68.78	69.49	69.99	70.52	71.12
DI Yogyakarta	76.81	77.59	77.38	78.89	79.53
Jawa Timur	68.14	68.95	69.74	70.27	70.77

Banten	69.89	70.27	70.96	71.42	71.95
Bali	72.48	73.27	73.65	74.3	74.77
Nusa Tenggara Barat	64.31	64.19	65.81	66.58	67.3
Nusa Tenggara Timur	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39
Kalimantan Barat	64.89	65.59	65.88	66.26	66.98
Kalimantan Tengah	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42
Kalimantan Selatan	67,63	68,38	69,05	69,65	70,17
Kalimantan Timur	73,82	74,17	74,59	75,12	75,85
Kalimantan Utara	68,64	68,76	69,2	69,84	70,56
Sulawesi	69,96	70,39	71,05	71,66	72,2
Sulawesi Tengah	66,43	66,76	67,46	68,11	68,88
Sulawesi Selatan	68,49	69,15	69,76	70,34	70,9
Sulawesi Tenggara	68,07	68,75	69,31	69,86	70,61
Gorontalo	65,17	65,86	66,29	67,01	67,71
Sulawesi Barat	62,24	62,96	63,6	64,3	63,1
Maluku	66,74	67,05	67,6	68,19	68,78
Maluku Utara	65,18	65,91	66,63	67,2	67,76
Papua Barat	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74
Papua	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06
INDONESIA	**68,9**	**69,55**	**70,18**	**70,18**	**71,39**

Sumber: BPS, “IPM Provinsi dan Nasional 2014-2018”

Berdasarkan Tabel 1 data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya Indeks pembangunan manusi maka semakin tinggi kualitas hidup masyarakat Indonesia. Terdapat nilai indeks pembangunan manusianya dalam tabel diatas di beberapa provinsi masih relatif rendah seperti Provinsi papua Barat yaitu Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Gorontalo, dan juga Provinsi Maluku Utara. Provinsi Papua Barat adalah salah satu Provinsi baru hasil dari Provinsi Papua yang terletak di barat pulau papua yang meliputi 13 (tiga belas) kabupaten kota antara lain Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, dan 1 (satu) Kota yankni Kota Sorong. Jadi di Provinsi Papua Barat itu terdapat 13 Kapubupaten/Kota yang memiliki letak geografis yang berbeda beda. Tabel di atas juga menyatakan bahwa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia maka indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Barat relatif masih rendah. Hal yang sama juga terjadi apabila Indeks Pembanginan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan angka indek pembangunan manusia Nasional. Dampak dari kesejateraan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh

jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program layanan publik. Oleh karena itu, maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat baik secara simultan maupun secara parsial.

Tabel 1. 3

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat T. A 2019 (Rp)

NO	NAMA DAERAH	DBH	DBH	C	DBH2	DBH SDA	DBH3	DBH4	DBH5	DBH6	DBH7	DBH8
		DBH PAJAK				DBH SDA						TOTAL DBH
		PPH	PBB	CHT	TOTAL DBH I	MIGAS	MINERBA	KEHUTANAN	P. BUMI	PERIKANAN	TOTAL DBH SDA	
1	2	3	4	5	(6)=(2)+(3)+	7	8	9	10	11	(12)=(7)+(8)	(13)=(6)+(12)
1	Kab. FakFak	1.696.298	13.671.229		15.367.527	42.293.581	1.662.973	1.836.999		983.593	46.7777.146	62.144.673
2	Kab. Manokwari	7.543.816	19.588.116		27.131.932	42.293.581	2.316.137	2.519.531		983.593	48.112.842	75.244.774
3	Kab. Sorong	3.935.392	167.538.590		171.473.982	84.474.474	203.665	2.435.024		983.593	88.096.756	295.570.738
4	Kota Sorong	11.080.408	7.234.477		18314.885	42.293.581	200.005	1.066.875		983.593	44.544.054	62.858.939
5	Kab. Raja ampat	1.726.514	11.604.196		13.330.710	42.293.581	3.802.390	1.088.022		983.593	48.167.586	61.498.296
6	Kab. Sorsel	1.822.891	11.348.588		13.171.477	42.293.581	200.005	1.898.339		983.593	45.375.518	58.546.995
7	Kab. Teluk Bintuni	13.691.053	295.094.182		308.785.235	465.342.080	1.116.886	5.763.155		983.593	473.205.714	781.990.949
8	Kab. Teluk Wondama	1.587.840	10.808.760		12.396.600	42.293.581	891.205	5.420.243		983.593	49.588.622	61.985.222
9	Kab. Kaimana	1.492.593	13.267.850		14.760.443	42.293.581	3.100.626	4.885.936		983.593	51.263.736	66.024.179
10	Kab. Maybrat	1.322.233	9.621.314		10.943.547	42.293.581	200.005	3.581.024		983.593	47.058.203	58.001.750
11	Kab. Tambrauw	1.594.415	10.525.134		12.119.549	42.293.581	200.005	1.638.496		983.593	45.115.675	57.235.224
12	Kab. Mansel	1.422.475	7.685.349		9.107.824	42.293.581	200.005	3.521.211		983.593	46.998.390	56.106.214
13	Kab. Pegaf	1.444.310	15.657.322		17.101.632	42.293.581	200.005	1.066.875		983.593	44.544.054	61.645.686

sumber : DIRJEN PERIMBANGAN 2019

Produk Dommestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatua produk tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas harga berlaku. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), PDRB adalah jumblah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Hal tersebut yang menyebabkan besaran nilai PDRB di masing-masing daerah bervariasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Pengeluaran Pendidikan, dan Pengeluaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masaalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan, Pengeluaran Pendidikan, dan Pengeluaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini menjadi landasan dalam meningkatan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat.

4.2 Manfaat Praktis

4.2.1 Bagi Pemerintah adalah sebagai satu informasi buat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan ekonomi mengenai aspek pembangunan manusia di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

4.2.2 Bagi Mahasiswa adalah sebagai bahan informasi, referensi, literature, maupun penelitian lebih lanjut.

4.2.3 Bagi Penulis adalah dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh rata-rata lama bersekolah angka harapan hidup, dan pengaruh kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

4.2.4 Bagi Masyarakat Umum adalah dapat menambah pengetahuan masyarakat umum, sebagai salah satu informasi mengenai IPM di Provinsi Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Azahari. 2000. "*Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia".* Journal of Indonesia Economy and Business. Volume 2.

Badan Pusat Statistika Nasional Publikasi (BPS Nasional), *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010-2018.*

Badan Pusat Statistika Publikasi, Provinsi Papua Barat *Produk Domestik Regional Bruto*, 2019.

BANK INDONESIA (Bank Sentral RI), *Provinsi Papua Barat. Laporan perekonomian Provinsi Papua Barat Mei 2019.*

Dominick. 2006. *MikroEkonomi* Edisi Keempat. Jakarta. Erlangga.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuanagan RepublikIndonesia, *Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat Per-fungsi 2016.*

Giting. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua* .Journal Uajy.ac.id Volume 2. Universitas Trisakti.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia/Dirjen Perimbangan, *Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil*, 2019.

Kotambunan. Tumilaar, Richard. 2016. *"Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)".* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16.

Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Nurhayati. 2015.*" Pengaruh Kemandirian daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Provinsi Tahun 2008-3013"* Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 1. Jakarat Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Nugraha dan Tia Amelia. 2017. *"Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten Dan Kota di Jawa barat tahun 2011-2014"* . Jurnal Wacana Kinerja. Volume 20, Nomor 1. Universitas Pendidikan Indonesia.

Prasetyoningrum. 2018. *"Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia"* EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6. Semarang. journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium.

Roseen, Harvey, S. 1999. *"Public Finance"* Edisi Kelima. Boston. Mcgraw.

Statistika Nasional Publikasi (BPS Nasional), *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010-2018.*

Syukri, dan Hinaya. 2019. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan*" Vol 2. JEMMA.

Susanti, Sussy. 2013. *"Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel"* Vol. 9. Jurnal Matematika Integratif.

Wijaya, Hendra. 2017. " *Analisis Pembangunan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua"* . Vol VIII, Nomor.